

Spiritualitas Politik dalam Perspektif Kristiani

Bernardus Ario Tejo Sugiarto
Universitas Katholik Parahyangan
b.ario.tejo.s@unpar.ac.id

Suggested Citation:

Sugiarto, Bernardus Ario Tejo. (2021). Spiritualitas Politik dalam Perspektif Kristiani. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 1, Nomor 3: pp. 404-407. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v1i3.13389>

Article's History:

Received June 2021; Revised July 2021; Accepted July 2021.
2021. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

Abstract:

Political Spirituality presented by Paulinus Yan Olla provides guidelines for the ideal relationship between the Catholic Church and political life, how to exercise political power inspired by the values of faith and humanity to achieve the common good. Political involvement is one way to the sanctity of life.

Keywords: Catholic Church, political life, holiness of life, Paulinus Yan Olla

Abstrak

Spiritualitas Politik yang disajikan oleh Paulinus Yan Olla memberikan pedoman bagaimana hubungan yang ideal antara Gereja Katolik dan kehidupan politik, bagaimana menjalankan kekuasaan politik dengan dijiwai oleh nilai-nilai iman dan kemanusiaan untuk mencapai kebaikan bersama. Keterlibatan politik merupakan salah satu jalan menuju kesucian hidup.

Keywords: Gereja Katolik, kehidupan politik, kesucian hidup, Paulinus Yan Olla

PENDAHULUAN

Tulisan ini adalah review atas buku: Dr. Paulinus Yan Olla, MSF, *Spiritualitas Politik, Kesucian Politik dalam Perspektif Kristiani*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2014, xvi + 181 pp., ISBN: 978-602-03-0268-3, harga: Rp. 55.000,-

GARIS BESAR ISI BUKU

Politik sering dipandang sebagai wilayah yang kotor karena sering mengabaikan peran moralitas di dalamnya. Dalam buku ini, Gereja Katolik merumuskan hubungan yang erat antara kehidupan beriman dan berpolitik berdasarkan pengalaman historis dan permenungan teologis. Secara ideal, agama dan negara adalah dua hal yang bersifat otonom, tidak dapat dicampuradukkan tetapi tidak dapat juga dipisahkan. Gagasan spiritualitas politik terdiri dari pemahaman tentang spiritualitas politik, hubungan antara spiritualitas dan kesucian politik, perwujudan spiritualitas politik dalam Gereja, dan panduan untuk menghayati spiritualitas politik.

Spiritualitas berasal dari kata bahasa latin *Spiritus* yang berarti Roh Allah. Spiritualitas adalah pengalaman hidup rohani, pengalaman akan kehadiran Allah. Spiritualitas politik merupakan pengalaman orang beriman akan Allah dalam bidang sosial-politik. Politik berasal dari kata Yunani *polis* yang berarti kota. Di dalam politik, semua warga negara berpartisipasi secara bebas dan aktif dalam meletakkan dasar hukum bagi suatu masyarakat maupun dalam tata pemerintahan. Spiritualitas politik merupakan suatu penghayatan kehidupan rohani dalam konteks dunia sosial-politik. Hal ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan negara teokratis.

Gereja Katolik memiliki pengalaman historis dalam berhubungan dengan negara. Pada abad I-III, Gereja Katolik menjadi korban penindasan dari pemerintahan Yahudi dan Romawi karena Gereja Katolik perdana yang mayoritas jemaatnya orang-orang Yahudi dianggap menyimpang dari tradisi dan ajaran agama Yahudi serta Gereja Katolik perdana menolak untuk mengikuti agama negara. Pada abad IV, Gereja Katolik melebur dengan pemerintahan Romawi karena Gereja Katolik telah diangkat menjadi agama negara untuk memperbaiki moral negara. Gereja Katolik mendapatkan keuntungan besar dari kekuasaan dalam penyebaran agama dan kebenaran ajaran. Gereja Katolik yang sebelumnya menjadi korban penindasan, kini menjadi pelaku penindasan. Pada abad XVIII, revolusi Prancis dengan semangatnya *liberté, égalité, fraternité* menyingkirkan semua ide-ide tentang monarki, aristokrasi dan katolisisme. Revolusi Prancis membawa semangat sekuler dalam sistem politik dan bersikap antiklerikal, antikatalisitas. Sejak saat itu, Gereja Katolik dipisahkan dari negara. Prinsip *cuius regio eius et religio* tidak bisa diterapkan lagi. Selanjutnya, orang Kristiani justru menolak untuk terlibat lagi dalam politik. Pada abad XX, sejak Konsili Vatikan II, Gereja Katolik merumuskan kembali panggilan keterlibatan umat Kristiani dalam kehidupan sosial-politik. Iman Kristiani harus membumi dalam realitas sosial-politik. Kehidupan spiritual dan kehidupan sosial-politik memiliki otonominya masing-masing tetapi tidak dapat dipisahkan. Dasar iman Kristiani untuk terlibat dalam kehidupan sosial-politik adalah misteri Allah Tritunggal Mahakudus dan misteri inkarnasi, Allah yang datang ke dalam dunia manusia untuk memperjuangkan kebaikan bersama seluruh umat manusia. Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa keterlibatan dalam urusan-urusan duniawi menjadi jalan menuju kesucian hidup. Tetapi, Gereja Katolik tidak ingin menyandarkan diri pada kekuasaan duniawi mana pun. Gereja Katolik tidak ingin mengulang apa yang terjadi di masa lampau. Hukum Gereja mengajak para pemimpin hierarki Gereja untuk tidak menggunakan haknya untuk terlibat dalam politik praktis. Gereja Katolik mempercayakan keterlibatan dalam ruang publik sebagai bidang khas kaum awam.

TANGGAPAN KRITIS ATAS BUKU

Sermada, seorang yang ahli Filsafat Timur, berpendapat bahwa Tradisi Barat memisahkan dengan sangat tajam ranah filsafat dengan ranah agama. Dasar dari filsafat adalah penalaran dan dasar dari agama adalah iman. Kebenaran filsafat berasal dari pemikiran rasional dan kebenaran iman berasal dari penerimaan pewahyuan. Namun, pemisahan ini tidak dapat berlaku di alam pemikiran Asia karena sejak dahulu sampai sekarang alam pemikiran Asia selalu mengandung sekaligus agama dan sekaligus filsafat, misalnya Budhisme dan Hinduisme (Koller, John M., 2010, p.viii-ix). Karena itu, pemisahan itu sulit diterapkan di Asia. Paus Yohanes Paulus II, pada tahun 1998 mengeluarkan surat ensiklik *Fides et Ratio* untuk mempertegas benang merah perjumpaan dua tradisi ini dalam sejarah pemikiran Gereja Katolik. Dua tradisi ini bagaikan dua sayap yang membawa jiwa manusia terbang menuju kontemplasi kebenaran (John Paul II, 1998). Pemikiran Paus Yohanes Paulus II dapat menjadi jembatan untuk masuk ke dunia Asia.

Dalam konteks kehidupan beragama, Indonesia memiliki situasi yang sangat khas, yaitu situasi pluralitas suku, budaya dan agama atau kepercayaan. Hampir seluruh masyarakat Indonesia memeluk agama atau kepercayaan tertentu sehingga kehidupan sosial-politik tidak dapat dipisahkan begitu saja dengan kehidupan beragama dan kepercayaan. Berpolitik dalam arti memperebutkan atau mempertahankan kekuasaan dengan menggunakan identitas kesukuan dan keagamaan adalah hal yang sering terjadi di Indonesia. Karena politik-politik identitas semacam ini, Indonesia tidak mungkin

menerapkan baik sistem negara Teokratik (negara yang mendasarkan sistem pemerintahannya pada satu agama mayoritas) maupun sistem negara sekuler (negara yang melarang sama sekali agama masuk ke dalam ruang-ruang publik). Sistem demokrasi (Pancasila) yang diterapkan dalam politik Indonesia adalah jalan tengah yang tidak didasarkan pada ajaran agama mayoritas (fusi) dan juga tidak menyingkirkan agama dari ruang publik (separasi) (Yudi Latif, 2011, p. 114-117). Darmaputera, menjelaskan peran keduanya. Di satu sisi, setiap agama menyumbangkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan universal, dan nilai kebaikan bersama untuk menjadi dasar kehidupan sosial-politik. Di sisi lain, negara memberikan perlindungan dan jaminan keamanan atas kehidupan beragama. Agama mempunyai tanggung-jawab kenegaraan dan negara mempunyai tanggung-jawab keagamaan. Agama tidak berpolitik dan negara tidak berteologi (Eka Darmaputera, 2001, p. 128-129). Oleh karena itu, Menoh menyitir pandangan Habermas bahwa secara ideal orang-orang beragama yang duduk di kursi pemerintahan harus memiliki kemampuan untuk memilah dengan tegas kewajiban sebagai orang beragama dengan kewajiban sebagai warga negara (Gusti A. B. Menoh, 2015, p.121). Namun, secara real di Indonesia, penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan untuk kepentingan kelompok agama tertentu sering terjadi. Hal ini terbukti dengan disahkannya beberapa kebijakan publik yang memarjinalisasi agama atau kepercayaan tertentu yang dianggap sesat.

Gereja Katolik yang mendasarkan keterlibatannya dalam kehidupan sosial-politik pada tradisi imannya akan menghadapi tantangan yang besar, yaitu bagaimana orang (awam) Katolik dapat terlibat dalam politik tanpa harus membawa identitas Gereja Katolik. Apalagi ada dualisme peran antara kaum hierarki dan kaum awam, yaitu: kaum hierarki yang mendalami dunia spiritualitas tidak terlibat dalam dunia sosial-politik (spiritualitas tanpa praktik politik), sedangkan kaum awam menerima mandat secara khusus untuk terlibat dalam dunia sosial-politik secara praktis tidak mendalami dunia spiritual sebagaimana kaum hierarki (praktik politik tanpa spiritualitas yang mendalam dan cenderung pragmatis). Dualisme peran ini membawa persoalan tersendiri dalam mewujudkan spiritualitas politik. Hal yang diperlukan adalah ruang untuk berbagi pengalaman untuk menyatukan pengalaman spiritual yang dimiliki oleh kaum hierarki dan pengalaman politik yang dimiliki oleh kaum awam sehingga pengalaman keduanya dapat saling menerangi dan saling memaknai.

Dalam dunia politik di Indonesia, ada yang harus dipertimbangkan oleh Gereja Katolik, yaitu sisi praktis dan pragmatis dari perpolitikan di Indonesia. Politik di Indonesia itu mahal harganya. Untuk mencapai sebuah kemenangan dalam sebuah kontestasi politik, dana yang dibutuhkan sangat besar mulai dari pencalonan, persiapan, kampanye, debat calon, pemilihan, selebrasi kemenangan sampai saat memegang kekuasaan. Situasi ini menciptakan sebuah sistem hanya orang ber-duit yang bisa berpolitik. Ketika kekuasaan berhasil diraih, balas jasa atau balas budi adalah ritual yang harus dijalankan. Selain itu, dialog kebenaran dan kerjasama antar agama atau kepercayaan adalah hal sangat penting di Indonesia. Jika tidak ada perdamaian antar agama maka situasi politik di Indonesia menjadi *chaos* (Hans Küng, 2010, p. 25). Gereja Katolik harus merumuskan posisi kebenaran imannya dalam konteks keberagaman iman dan kepercayaan di Indonesia secara dialogis.

Bagaimanapun, Spiritualitas Politik yang disajikan oleh Paulinus Yan Olla memberikan pedoman bagaimana hubungan yang ideal antara Gereja Katolik dan kehidupan politik, bagaimana menjalankan kekuasaan politik dengan dijiwai oleh nilai-nilai iman dan kemanusiaan untuk mencapai kebaikan bersama. Keterlibatan politik merupakan salah satu jalan menuju kesucian hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmaputera, Eka. (2001). Bukan Keterpisahan, Tapi Kemitraan, Beberapa Catatan Sekitar Hubungan Agama dan Negara: Refleksi Seorang Kristen Protestan. In Eddy Kristiyanto (Ed.), *Etika Politik dalam Konteks Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- John Paul II. (1998). *Fides et Ratio. Encyclical Letter on The Relationship Between Faith And Reason*. Libreria Editrice Vaticana.
- Koller, John M. (2010). *Filsafat Asia*. Diterjemahkan oleh Donatus Sermada dari buku *Asian Philosophies*. Maumere-Flores: Penerbit Ledalero.
- Küng, Hans. (2010). Tak Ada Perdamaian Dunia Tanpa Perdamaian Agama-agama. Diterjemahkan oleh Mega Hidayati, M.A., Endy Saputrom M.A., dan Budi Asyhari, M.A. In Najiyah Martiam, M.A (Ed.), *Jalan Dialog Hans Küng dan Perspektif Muslim*. Universitas Gadjah Mada: Sekolah Pascasarjana, Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCS).
- Menoh, Gusti A. B. (2015). *Agama dalam Ruang Publik, Hubungan Agama dan Negara dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius.
- Olla, Dr. Paulinus Yan, MSF. (2014). *Spiritualitas Politik, Kesucian Politik dalam Perspektif Kristiani*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Latif, Yudi. (2011). *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).